

InAng Cestar

Informasi APBN yang Cepat, Transparan, Responsif

Desa/Nagori Laras,
Desa Role Model

Dampak Pembentukan Kabinet Merah Putih
terhadap Pertanggungjawaban APBN

Pemanfaatan AI (Artificial Intelligence)
dalam Pengelolaan Keuangan Negara Yang Lebih Optimal

**Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM) KPPN Pematang Siantar**

Edisi VIII Tahun 2025

Courtesy: unsplash.com

Serba-Serbi Kota Pematangsiantar

Mengenal lebih dekat Museum Simalungun:
Jendela Sejarah dan Budaya Suku Simalungun



Selayang Pandang

Dengan memanjatkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pematang Siantar berhasil menerbitkan edisi perdana Buletin Inang CETAR Edisi VIII Tahun 2024.

Buletin Inang Cetar Edisi-VIII kali ini memuat timeline kegiatan KPPN Pematang Siantar sepanjang triwulan IV tahun 2024 serta informasi realisasi APBN sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2024 yang disalurkan oleh KPPN Pematang Siantar. Selain itu edisi kali ini memuat artikel-artikel menarik seputar peran APBN dalam pelaksanaan pesta Demokrasi, pemberdayaan UMKM, pembangunan Zona Integritas serta serba-serbi Kota Pematang Siantar dan Kab. Simalungun.

Selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di Kota Pematangsiantar dan Kab. Simalungun, KPPN Pematang Siantar menyalurkan dana APBN untuk pembangunan daerah di kedua kabupaten/kota tersebut. Memperingati Hari Bakti Perbendaharaan ke-20, KPPN Pematang Siantar berkomitmen untuk terus bertransformasi memberi pelayanan prima dalam melayani stakeholder khususnya di kedua kabupaten wilayah kerja KPPN Pematang Siantar.

Kami berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung penyusunan buletin Inang Cetar. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan buletin tersebut, masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Selamat membaca. Kiranya buletin ini dapat menjadi sumber informasi yang menarik kepada stakeholder untuk mendukung keuangan daerah khususnya dan keuangan nasional menuju Indonesia Maju!



Nova Juliana Sianturi

Kepala KPPN Pematangsiantar

Nova Juliana Sianturi

DAFTAR



Courtesy. unsplash.com

ISI

01

Selayang
Pandang

02

Daftar ISI

04

Realisasi
APBN

08

Realisasi
TKD

10

Artikel

Desa/Nagori Laras, Desa
Role Model 10

Dampak Pembentukan
Kabinet Merah Putih
terhadap
Pertanggungjawaban APBN 15

Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah
Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) KPPN
Pematang Siantar 19

Pemanfaatan AI (Artificial
Intelligence) dalam Pengelolaan
Keuangan Negara Yang Lebih
Optimal 21

Mengenal lebih dekat
Museum Simalungun:
Jendela Sejarah dan
Budaya Suku Simalungun 24

26

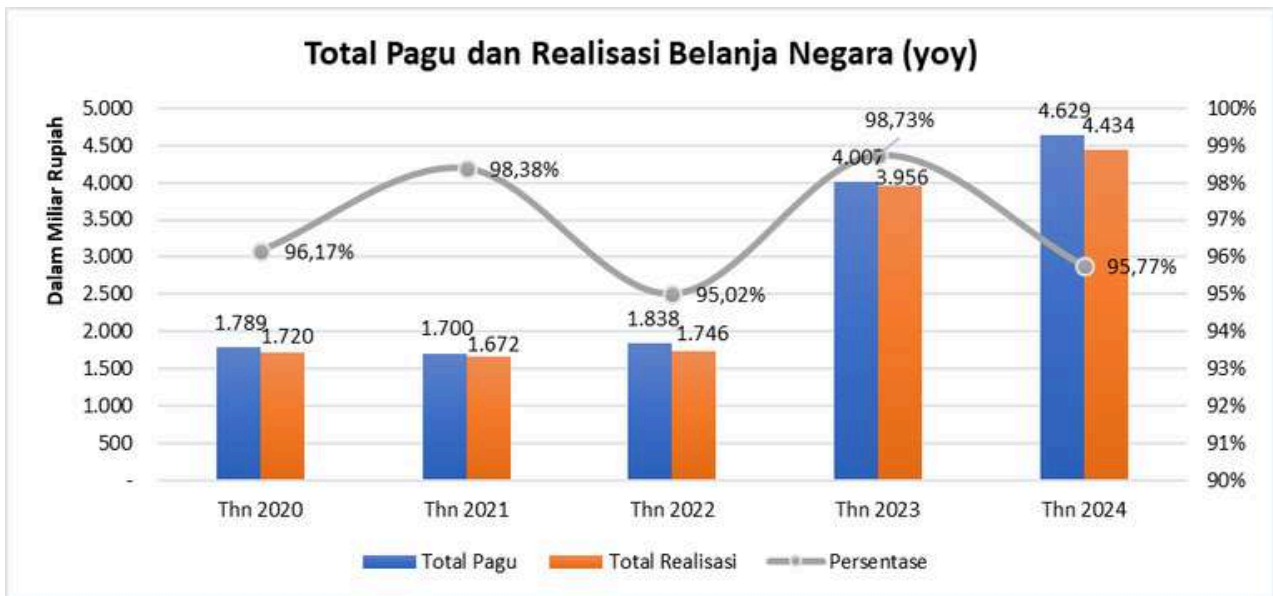
Timeline

46

Tim Buletin



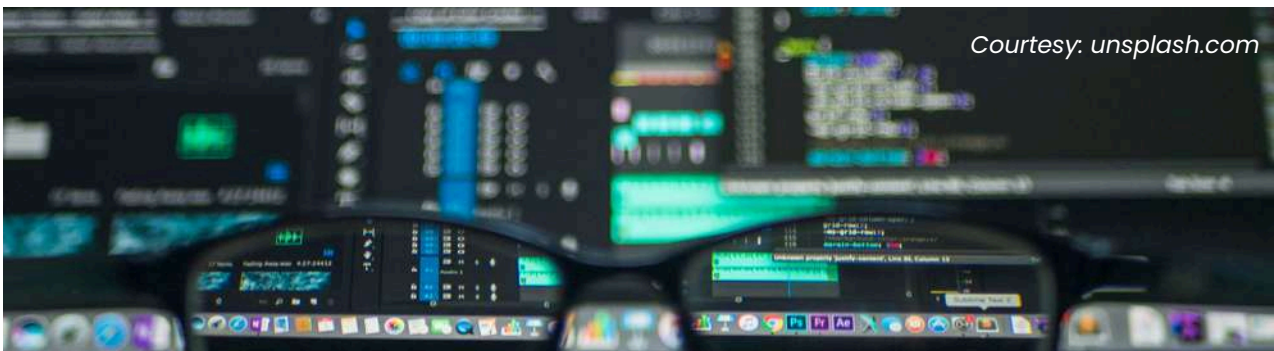
Realisasi APBN



Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Negara (update data OMS PAN 10/01/2025)

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan dan pengawasan APBN, KPPN Pematang Siantar senantiasa menyampaikan informasi realisasi atas APBN di Wilayah Mitra KPPN Pematang Siantar. Diagram diatas merupakan kondisi pagu dan realisasi APBN Wilayah KPPN Pematang Siantar periode s.d Desember 2025. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa trend pagu dan realisasi anggaran belanja pada KPPN Pematang Siantar setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif. Pada tahun 2024, Pagu Anggaran Belanja mencapai nilai sebesar Rp4.629.428.589.000,00 dengan capaian Realisasi Anggaran Belanja sebesar Rp4.433.528.312.755,00. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2023), terdapat pertumbuhan positif sebesar 15,54% pada Pagu Anggaran Belanja dan sebesar 12,08% pada Realisasi Anggaran Belanja. Kendati demikian, persentase capaian realisasi belanja pada tahun ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja sebagaimana disebutkan sebelumnya terdiri dari 2 bagian yakni Belanja Pemerintah Pusat dan Belanja Transfer Ke Daerah dengan masing-masing rincian sebagai berikut:



a. Belanja Pemerintah Pusat

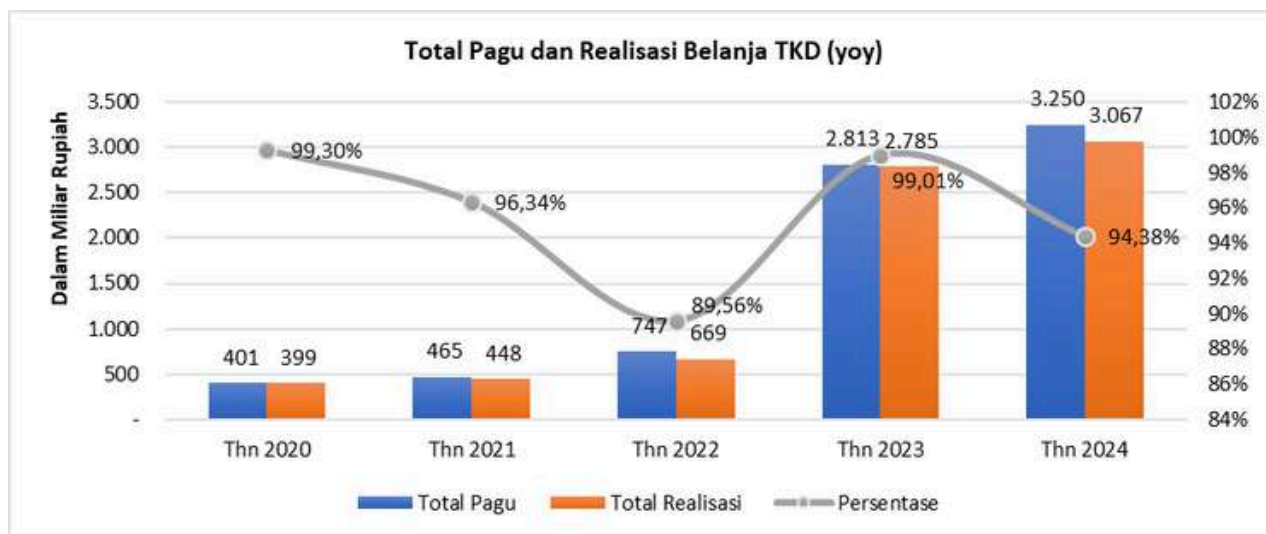


Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (update data OMS PAN 10/01/2025)

Rincian belanja Pemerintah Pusat pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Total Pagu Anggaran Belanja Rp1.379.187.286.000,-
- Total Realisasi Anggaran Belanja Rp1.366.087.527.434,- (99,05%)

b. Belanja Transfer Ke Daerah



Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Transfer Ke Daerah (update data OMS PAN 10/01/2025)

Rincian belanja Pemerintah Ke Daerah pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Total Pagu Anggaran Belanja Rp3.250.241.303.000,-
- Total Realisasi Anggaran Belanja Rp3.067.440.785.321,- (94,38%)

Pada tahun 2024, terdapat pertumbuhan positif pada pagu dan realisasi anggaran baik pada Belanja Pemerintah Pusat dan juga Belanja Transfer Ke Daerah yang dapat dilihat pada tabel berikut:

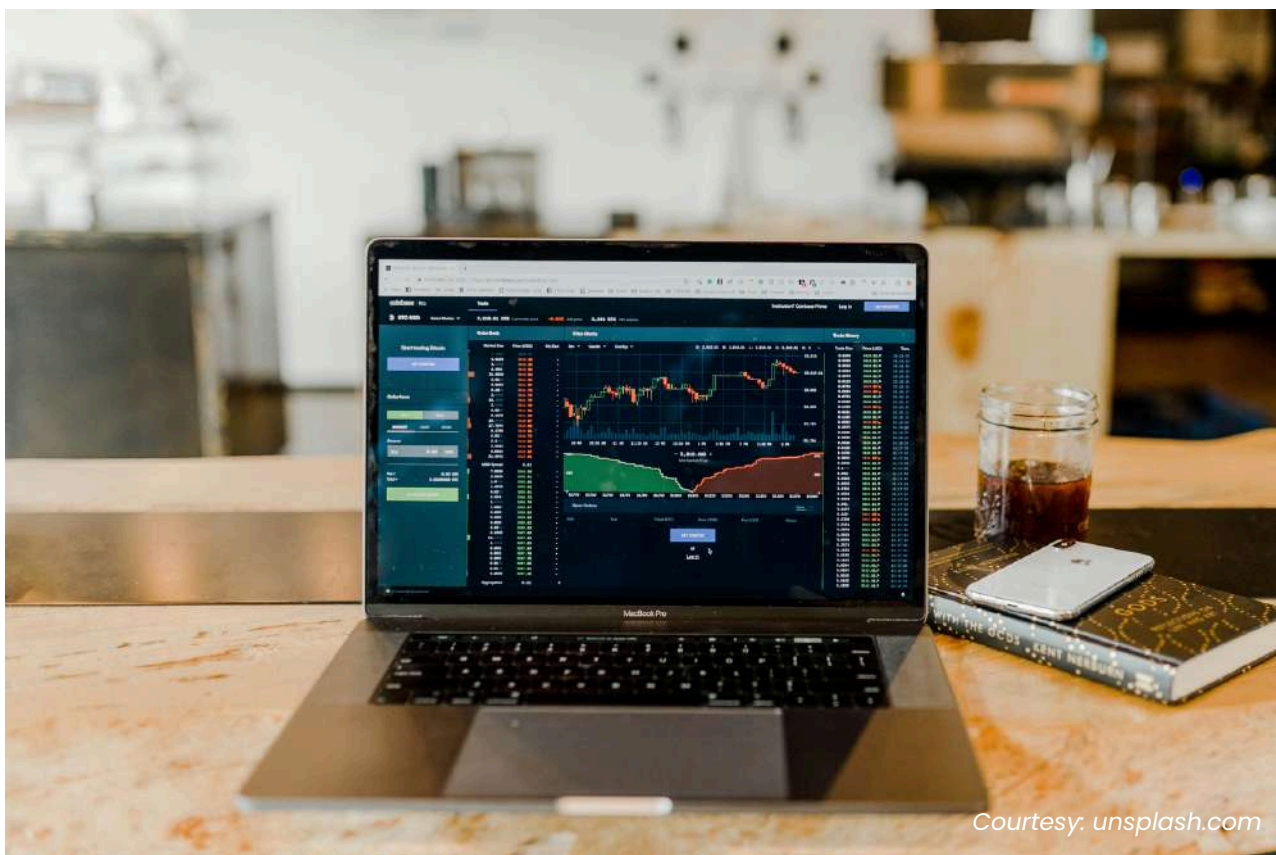
Uraian (Dalam Miliar Rupiah)	Tahun 2023			Tahun 2024			Growth Realisasi (%)
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	(yoy)
B. Belanja Negara	4.006.637.633.000	3.955.570.593.676	98,73%	4.629.428.589.000	4.433.528.312.755	95,77%	12,08
1. Belanja K/L	1.193.437.072.000	1.170.210.295.017	98,05%	1.379.187.286.000	1.366.087.527.434	99,05%	16,74
51-Belanja Pegawai	769.809.658.000	763.998.368.033	99,25%	838.265.739.000	856.078.032.430	102,12%	12,05
52-Belanja Barang	384.015.468.000	368.186.103.863	95,88%	484.148.160.000	454.019.789.962	93,78%	23,31
53-Belanja Modal	39.611.946.000	38.025.823.121	96,00%	56.773.387.000	55.989.705.042	98,62%	47,24
2. Transfer Ke Daerah	2.813.200.561.000	2.785.360.298.659	99,01%	3.250.241.303.000	3.067.440.785.321	94,38%	10,13
61-DBH	112.248.885.000	111.727.101.450	99,54%	97.318.047.000	97.291.446.510	99,97%	-12,92
62-DAU	1.780.124.858.000	1.780.086.198.542	100,00%	2.087.895.254.000	1.941.561.978.140	92,99%	9,07
63-DAK Fisik	99.353.128.000	91.839.657.440	92,44%	235.036.598.000	222.028.793.197	94,47%	141,76
64-Dana Insentif Fiskal	5.819.949.000	5.819.949.000	100,00%	6.737.985.000	6.737.985.000	100,00%	15,77
65-DAK Non Fisik	474.924.395.000	455.520.672.227	95,91%	479.584.565.000	456.151.728.474	95,11%	0,14
66-Dana Desa	340.729.346.000	340.366.720.000	99,89%	343.668.854.000	343.668.854.000	100,00%	0,97

Secara umum, pertumbuhan total realisasi anggaran belanja pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan positif yakni sebesar 12,08%. Hal tersebut didukung dengan adanya pertumbuhan realisasi belanja Pemerintah Pusat (belanja K/L) sebesar 16,74% dan belanja Transfer Ke Daerah sebesar 10,13%.

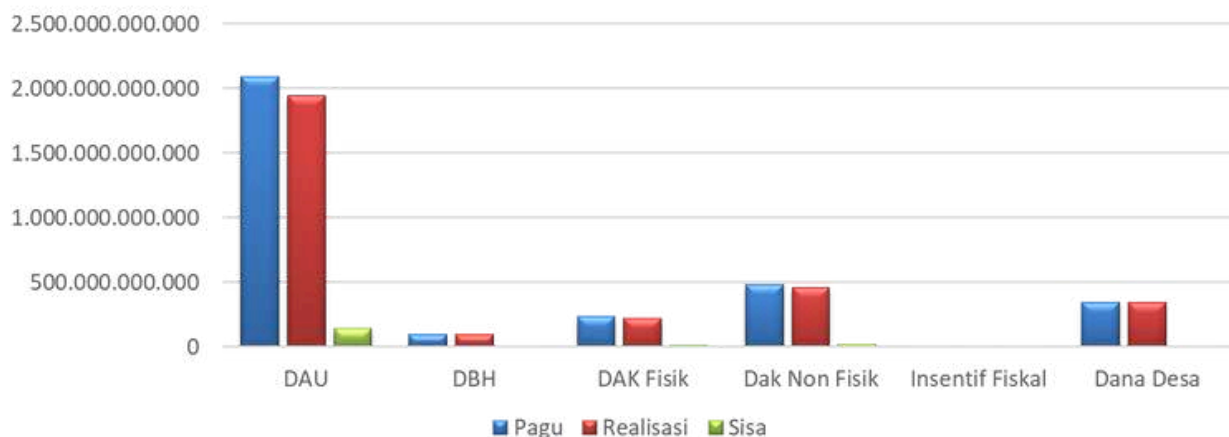
Bila dilihat lebih rinci, pertumbuhan belanja pemerintah pusat sebesar 16,74% tersebut didukung dengan adanya pertumbuhan belanja pegawai (12,05%), belanja barang (23,31%) dan belanja modal (47,24%). Saat ini (10/01/2025) masih terdapat pagu minus pada belanja pegawai dengan total pagu minus sebesar -Rp33.277.070.296,-. Belanja barang pada tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang disebabkan karena pada tahun ini telah dilaksanakan Pemilu dan Pilkada serta adanya penambahan satu satker baru di KPPN Pematang Siantar yakni satker Sekretariat Bawaslu Kab. Simalungun. Belanja modal juga mengalami peningkatan pada tahun ini sebesar 47,24% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun belanja modal terbesar di tahun 2024 ada di satker Lembaga Masyarakat Pematang Siantar (405848) dengan total pagu sebesar Rp35.598.405.000,- dan total realisasi sebesar Rp35.425.919.824,- (99,52%) dengan jenis pekerjaan berupa Konstruksi Pembangunan Blok Hunian, Pekerjaan Pagar Pembatas Area, Sumur Dalam, Ground Tank dan Instalasi Air Bersih, Saluran Drainase Lingkungan, Bio Septic Tank dan Penambahan Daya PLN dan Trafo Pada Lapas Kelas IIA P.Siantar Sumut TA 2024.

Realisasi Anggaran Belanja Transfer Ke Daerah pada tahun 2024 juga mengalami pertumbuhan sebesar 10,13% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut didukung dengan adanya pertumbuhan yoy pada belanja DAU (9,07%), DAK Fisik (141,76%), Dana Insentif Fiskal (15,77%), DAK Non Fisik (0,14%) dan Dana Desa (0,97%) meski terdapat pertumbuhan negative pada Belanja DBH (-12,92%). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2024 terdapat penurunan pagu anggaran DBH yang disebabkan karena proses rekonsiliasi pajak pusat atas pembayaran melalui APBD di Kota Pematang Siantar belum dilaksanakan untuk tahun 2022 s.d. 2024.

APBN pada tahun 2024 telah direalisasikan dengan memenuhi ketentuan dan telah memenuhi minimal target realisasi penyerapan anggaran pada triwulan IV. APBN diharapkan untuk selalu menjadi katalisator perkembangan ekonomi sehingga perlu dilakukan pengawasan secara berkala dan bertanggungjawab dari berbagai pihak. Mari bersama mengawal APBN untuk Indonesia yang lebih baik.



Realisasi Transfer ke Daerah



Pada tahun 2024, penyaluran Transfer Ke Daerah Lingkup KPPN Pematang Siantar sebesar Rp3.067.440.785.321 atau 94,37% dari total pagu Rp3.250.241.303.000, dengan rincian per jenis transfer sebagai berikut:

No	Jenis Transfer	Pagu	Realisasi	% Real	sis	% sisa
1	DAU	2.087.895.254.000	1.941.561.978.140	92,99%	146.333.275.860	7,01%
2	DBH	97.318.047.000	97.291.446.510	99,97%	26.600.490	0,03%
3	DAK FISIK	235.036.598.000	222.028.793.197	94,47%	13.007.804.803	5,53%
4	DAK NON FISIK	479.584.565.000	456.151.728.474	95,11%	23.432.836.526	4,89%
5	Insentif Fiskal	6.737.985.000	6.737.985.000	100%	0	0%
6	Dana Desa	343.668.854.000	343.668.854.000	100%	0	0%
TOTAL		3.250.241.303.000	3.067.440.785.321	94,37%	182.800.517.679	5,63%

Pada tahun 2024 penyaluran DAK Fisik sebesar Rp222.028.793.197 atau 94,47% dari total pagu Rp235.036.598.000 atau 97,34% dari total Kontrak Rp228.076.502.710 dengan rincian per daerah sebagai berikut:

NO	TA	PEMDA	PAGU	RK	KONTRAK	%KONTRAK	Penyaluran	%PENYALURAN
1	2024	0705 KAB. SIMALUNGUN	216.876.342.000	216.080.212.933	210.798.718.871	97.56%	204.755.773.878	94.41%
2	2024	0754 KOTA PEMATANGSIANTAR	18.160.256.000	17.453.328.800	17.277.783.839	98.99%	17.273.019.319	95.11%
Jumlah			235.036.598.000	233.533.541.733	228.076.502.710	97.66%	222.028.793.197	94.47%

Total nilai kontrak yang tidak terealisasi sebesar Rp6.047.709.513 atau sebesar 2,65% dari total kontrak.

Pada tahun 2024, penyaluran DAK Fisik Bertahap sebesar Rp186.575.242.112 atau 94,95% dari total RK Bertahap 196.490.275.960 atau 96,88% dari total Kontrak bertahap Rp192.578.511.632 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kab./Kota	Tahun 2024			Tahun 2023		
		I	II	III	I	II	III
1	Kab. Simalungun	46.652.101.737 (25% RK)	83.973.783.130 (45% RK)	46.181.941.046 (24,74% RK)	15.510.063.600 (25% RK)	27.918.114.480 (45% RK)	13.759.724.898 (22,17% RK)
2	Kota Pematangsiantar	2.470.467.250 (25% RK)	4.446.841.049 (45% RK)	2.850.107.900 (28,84% RK)	2.464.312.987 (25% RK)	4.435.763.377 (45% RK)	2.032.634.756 (20,62% RK)

Total nilai kontrak bertahap yang tidak terealisasi tahun 2024 sebesar Rp6.003.269.520 atau sebesar 3,11% dari total kontrak bertahap. Sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp45.350.000 atau 0,0007% dari total kontrak bertahap Rp66.165.964.098.

Pada tahun 2024, penyaluran Dana Desa sebesar Rp343.668.854.000 atau 100% dari total pagu Rp343.668.854.000. Sedangkan pada tahun 2023, disalurkan sebesar Rp274.205.733.000 atau 99,86% dari total pagu Rp274.568.359.000 dengan rincian per tahap sebagai berikut:

No	Kab./Kota	Tahun 2024		Tahun 2023		
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP I	TAHAP II	Tahap III
1	Kab. Simalungun	166.363.853.000 386 Desa	166.610.817.000 386 Desa	99.455.105.700 386 Desa	99.043.323.700 385 Desa	75.707.303.600 383 Desa



Desa/Nagori Laras, Desa Role Model

(Kerja sama KPPN Pematang Siantar dan DPMN Kab. Simalungun)

Oleh: Tommy Hansen Panjaitan

Hadirnya Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang untuk desa mengatur rumah tangga, mengelola anggaran dan melaksanakan proses pembangunan desa sejak dari perencanaan. Selanjutnya dalam rangka pembangunan desa maka disusunlah daftar skala prioritas kegiatan baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Desa yang selaras dengan RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RPJMN.

RPJMD Desa memberikan arah dan panduan pembangunan desa, serta menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiayai oleh APBDes, APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN. Kegiatan pembangunan desa yang dibiayai oleh APBN melalui alokasi Dana Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui KPPN di seluruh Indonesia. KPPN Pematang Siantar secara khusus menyalurkan Dana Desa pada Kabupaten Simalungun.



Sebagai bagian dari sinergi dengan Pemerintah Daerah lingkup wilayah kerja KPPN Pematang Siantar dan dalam rangka penyaluran dana Transfer Ke Daerah (TKD) termasuk Dana Desa yang efektif, tepat sasaran dan tepat waktu telah dilakukan berbagai kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, *focus group discussion*, monitoring dan evaluasi penyaluran. Kepala KPPN Pematang Siantar juga telah melakukan koordinasi yang intensif dengan para Kepala Daerah melalui kunjungan langsung, sehingga komitmen untuk percepatan penyaluran dana TKD dapat terjaga.

Disamping hal-hal teknis tersebut, KPPN Pematang Siantar telah menjalin kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori (DPMN) Kab. Simalungun untuk mewujudkan Program “Desa Role Model” pada tahun 2023. Program dimaksud merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan “Piagam Horas Chartered” Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Utara yang bertujuan untuk memajukan pemerintahan desa dalam mengelola keuangan desa di seluruh wilayah kerja masing-masing KPPN dalam lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2023, KPPN Pematang Siantar melakukan penyaluran Dana Desa terhadap 386 nagori/desa di Kab. Simalungun. Selanjutnya Desa Role Model akan menjadi contoh bagi desa lainnya dalam pengelolaan keuangan desa dan Dana Desa.

Pemilihan Nagori/Desa Laras sebagai Desa Role Model berdasarkan usulan Pemda Kab. Simalungun sesuai permintaan KPPN Pematang Siantar. Selanjutnya DPMN Kab. Simalungun melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Dana Desa di desa tersebut dan faktor pendukung lainnya seperti potensi yang ada pada desa.



Kondisi Wilayah

Desa Laras secara geografis dan secara administratif merupakan salah satu dari 10 nagori dan kelurahan di Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun dan memiliki luas wilayah 998 Km². Desa Laras berbatasan langsung dengan Desa Naga Jaya I di sebelah barat, dengan Desa Bandar Tengah di sebelah timur, dengan Desa Bah Gunung di sebelah utara serta Desa Dolok Parmonangan di sebelah selatan.

Jumlah penduduk Desa Laras berdasarkan Profil Nagori tahun 2016 sebanyak 1.134 jiwa (272 KK) yang terdiri dari dengan berbagai macam suku diantaranya Jawa, Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Mandailing, Batak Karo dan Minang. Wilayah Desa Laras secara keseluruhan atau 100 persen merupakan Hak Guna Usaha (HGU) yang terletak di areal PT. Perkebunan Nusantara IV unit Kebun Laras.

Pada tahun 2023, Desa Laras dipimpin oleh Pangulu/Kepala Desa Bapak Wagimun dan Sekretaris Desa M. Ihsan Tanjung dengan dibantu Kepala Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Keuangan/Bendahara Desa. Desa Laras terdiri dari 3 Dusun yang dipimpin Kepala Dusun. Dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa Laras, terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dipimpin oleh Bapak Tarmizi.

Sebagian besar penduduk Desa Laras bekerja pada sektor perkebunan dan sebagian kecil bekerja pada bidang pertanian, pedagang, pengrajin industri rumah tangga, peternakan, PNS dan pensiunan TNI/Polri/PNS. Tingkat pendidikan yang dominan di Desa Laras adalah lulusan SLTA serta sebagian lainnya yaitu lulusan SD, SLTP, akademi dan Perguruan Tinggi.

Kondisi Umum

Infrastruktur Desa Laras sudah tersedia jalan desa, jalan aspal, jalan perkerasan jalan antar nagori, rabat beton dan jembatan. Sementara itu potensi yang dimiliki Desa Laras antara lain sumber daya alam (peternakan, perikanan, lahan perkebunan, sumber mata air), potensi sumber daya ekonomi (lembaga dana bergulir, home industri, lahan perkebunan/HGU, sarana produksi lainnya), sumber daya sosial (fasilitas pendidikan umum, fasilitas pendidikan agama, tempat belajar masyarakat, lembaga adat).

Kondisi Penyaluran Dana Desa

Dana Desa di Desa Laras untuk 3 tahun terakhir telah disalurkan seluruhnya seperti dapat digambarkan sebagai berikut:

TAHUN	PAGU	PAGU TAMBAHAN	ALOKASI TH DEPAN	PAGU SILPA	PENYALURAN	PENYERAPAN	SISA RKD
2023	654.246.000	133.823.000	-	25.315.636	788.069.000	412.125.588	401.259.048
2022	668.604.000		25.315.636	62.817.407	668.604.000	706.105.771	-
2021	649.900.000		62.817.407	12.038.100	649.900.000	599.120.693	-

Penyaluran Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Disamping BLT Dana Desa terdapat juga Bantuan Pemerintah lainnya yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Pangan Bulog, Bantuan Pengentasan Rawan Stunting, Bantuan Lansia dan disabilitas dan Bantuan Kemiskinan Ekstrem.

Sementara itu persentase pajak yang dibayar dari pagu (TER) berdasarkan data dari KPP Pematangsiantar sejak tahun 2022 adalah seperti berikut:

Desa	Pagu 2024	Potensi Pajak	Penerimaan 2024	Realisasi dari Potensi	Sisa Potensi	Penerimaan 2023	TER 2023	Penerimaan 2022	TER 2022
Laras	916.283.000	36.321.128	6.430.113	17.70%	29.891.015	17.753.501	1.89%	5.377.302	0.57%

Dilihat dari tabel di atas, terlihat tingkat penyetoran pajak yang berasal dari Desa Laras relatif tinggi dan potensi penerimaan tahun 2024 mengalami peningkatan dari realisasi penerimaan tahun 2023 dan 2022.

Pelaksanaan Bumdes Desa Laras

Pada Tahun 2023, Desa Laras memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bernama Laras Jaya. BUMDes Laras Jaya merupakan toko yang menyediakan sembako, penyewaan perlengkapan alat pesta dan bekerjasama dengan Bank Mandiri untuk menyediakan "Mandiri Link" untuk penarikan uang tunai. Toko tersebut juga menyediakan kebutuhan sehari-hari masyarakat desa. Sumber dana BUMDes sendiri berasal dari penyaluran Dana Desa. Selama berdirinya BUMDes telah memperoleh keuntungan yang dinikmati masyarakat desa melalui SHU.

Penanganan *Stunting*

Selama tahun 2023 Desa Laras mempunyai program pencegahan dan penanganan *stunting* yang dibiayai oleh Dana Desa. Program pencegahan ini berupa pemberian susu kepada anak usia 6-12 bulan sebanyak 11 orang, usia 12 bulan sampai dengan 3 tahun sebanyak 42 orang dan umur 3 s.d 5 tahun sebanyak 30 orang serta pemberian kepada ibu hamil sebanyak 8 orang. Selain itu Pemerintah juga menyalurkan Bantuan Pengentasan Rawan *Stunting* (BPRS) kepada 11 KK di Desa Laras.

Peran KPPN dalam Pelaksanaan Desa Role Model

Kegiatan Desa Role Model yang telah dilaksanakan oleh KPPN Pematangsiantar antara lain melaksanakan bimbingan dalam penyaluran Dana Desa pada Pemda, memberikan pendampingan terhadap pengelolaan keuangan desa seperti penyelesaian pertanggungjawaban belanja APBDes dan memberikan pemahaman tentang perpajakan keuangan desa kepada aparat desa yaitu Kepala Desa dan Bendahara Desa bekerjasama dengan KPP Pratama Pematangsiantar.

Desa Laras dalam pelaksanaan penyaluran Dana Desa telah menggunakan sistem yang baik dan telah menggunakan aplikasi dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan desa. Program pembangunan pada Desa Laras diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan inovasi sistem yang digunakan oleh Desa Laras, Desa Laras sebagai Desa Role Model dapat menjadi contoh bagi desa lainnya di wilayah Kabupaten Simalungun.



Courtesy: unsplash.com

Dampak Pembentukan Kabinet Merah Putih terhadap Pertanggungjawaban APBN

Oleh: Surya Hadi Permana



Courtesy: unsplash.com

Pembentukan Kabinet Merah Putih berdampak pada pergeseran tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Kabinet yang dibentuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini terdiri atas 48 menteri, 7 pejabat setingkat menteri, dan 55 wakil menteri dengan perincian 23 kementerian yang tidak berubah (tetap), 16 kementerian baru, 2 kementerian berubah nomenklatur, 5 badan baru, dan 2 badan berubah status menjadi kementerian. Pembentukannya sendiri didasarkan pada UU Nomor 61 Tahun 2024 yang merupakan Perubahan Atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang tidak lagi membatasi jumlah Kementerian. Adanya perubahan kementerian akan berdampak pula pada penyesuaian atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran pada APBN Tahun 2024.



Courtesy: unsplash.com



Mengingat Alokasi anggaran tahun 2024-2025 dan aset masih teralokasikan pada K/L yang lama (belum terdistribusikan ke K/L baru), dalam masa transisi, sesuai Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029, Pelaksanaan tugas dan fungsi K/L menggunakan SDM, aset, dan anggaran yang tersedia sesuai tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaannya, Menteri Keuangan telah menetapkan PMK Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di lingkungan Kementerian dan Lembaga. Dalam beleid tersebut, Kementerian/Lembaga (K/L) pada kabinet merah putih dikelompokkan ke dalam 5 kluster.

Pertama, K/L yang tidak mengalami perubahan. K/L yang tidak mengalami perubahan tetap menjalankan dan bertanggungjawabkan anggarannya sesuai dengan Bagian Anggaran (BA) yang ada. Kedua, K/L yang mengalami perubahan nomenklatur. K/L yang mengalami perubahan nomenklatur masih menggunakan kode Bagian Anggaran yang sama/lama. Ketiga, K/L yang mengalami pemisahan. K/L yang mengalami pemisahan sebagian menggunakan kode Bagian Anggaran yang sama dan sebagian lainnya menggunakan kode Bagian Anggaran yang baru. Keempat, K/L yang mengalami penggabungan. K/L yang mengalami penggabungan menggunakan Bagian Anggaran salah satu K/L yang digabungkan. Kelima, K/L yang baru dibentuk. K/L yang baru dibentuk menggunakan Bagian Anggaran Kementerian Sekretariat Negara atau kementerian lain yang ditetapkan.

Untuk K/L yang tidak mengalami perubahan tidak diperlukan penyesuaian atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran tahun 2024. K/L yang tidak mengalami perubahan menjalankan dan bertanggungjawabkan anggarannya sebagaimana mestinya. Sedangkan untuk K/L yang mengalami perubahan, penggabungan, pemisahan, dan baru terbentuk melakukan penyesuaian atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:

1. K/L yang mengalami perubahan nomenklatur

Tetap melaksanakan program dan kegiatan pada Bagian Anggaran yang tercantum dalam DIPA TA 2024. Dalam hal terdapat penyesuaian anggaran, dapat dilakukan Revisi DIPA TA 2024. Kewajiban penyusun Laporan Keuangan (LK) dan penanggung jawab LK pada masa transisi (tahun 2024) berada pada Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur

2. K/L yang mengalami pemisahan

Pelaksanaan DIPA dikoordinasikan oleh K/L Pengampu. Menteri/Pimpinan Lembaga Pengampu bertindak sebagai PA DIPA TA 2024 (K/L awal). Penunjukan K/L Pengampu ditetapkan Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan. Alokasi anggaran pada BA K/L Pengampu juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan tugas dan fungsi K/L hasil pemisahan. Kewajiban penyusun Laporan Keuangan (LK) dan penanggung jawab LK pada masa transisi (tahun 2024) berada pada Menteri/Pimpinan Lembaga Pengampu.

3. K/L yang mengalami penggabungan

K/L yang mengalami penggabungan (Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara) tetap melaksanakan DIPA TA 2024 s.d. 31 Desember 2024. Menteri/Pimpinan Lembaga yang menerima penggabungan, bertindak sebagai PA atas BA TA 2024 K/L yang digabungkan. Dalam hal terdapat penyesuaian anggaran, dapat dilakukan Revisi DIPA TA 2024. Kewajiban penyusun Laporan Keuangan (LK) dan penanggung jawab LK pada masa transisi (tahun 2024) berada pada Menteri/Pimpinan Lembaga yang menerima penggabungan atas DIPA BA K/L yang digabungkan dan DIPA BA K/L yang menerima penggabungan.

4. K/L yang baru dibentuk

Kementerian Sekretariat Negara atau Kementerian/Lembaga lain mengampu pelaksanaan anggaran K/L yang baru dibentuk.



Courtesy: unsplash.com

K/L yang mengalami perubahan dengan kriteria tertentu dapat mengalami likuidasi. Pelaksanaan Likuidasi berpedoman dengan PMK 48/PMK.05/2017 tentang Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada K/L. Proses likuidasi dilaksanakan setelah LKPP Tahun Anggaran 2024 selesai diaudit. K/L (Entitas Pelaporan) atau Satker (Entitas Akuntansi) yang harus Likuidasi sebagai dampak dari perubahan struktur kabinet adalah yang mengalami perubahan identitas (perubahan kode BA, perubahan kode Eselon, atau perubahan kode satker). Penyelesaian likuidasi dilakukan dengan cara menyelesaikan hal terkait pelaksanaan anggaran (gaji induk bulan berikutnya, kontrak tahun jamak, pengesahan hibah langsung serta pendapatan dan belanja BLU), penyelesaian aset dan kewajiban, serta Melakukan Rekonsiliasi dan Penyusunan LK sesuai Perdirjen 8/PB/2023. Itulah beberapa mekanisme perlakuan terhadap perubahan K/L yang terdampak Kabinet Merah Putih Tahun 2024. Mari kita dukung transformasi struktur kabinet dan pemerintahan dengan tetap berkomitmen untuk mengawal APBN demi Indonesia Emas 2045.

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) KPPN Pematang Siantar

Oleh: Yusuf Prihantoro



Sebagai upaya untuk meraih Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI Menuju WBBM), KPPN Pematang Siantar terus melakukan pembenahan baik dengan peningkatan kualitas layanan, sarana prasarana, maupun sumber daya manusia yang memberikan layanan. Pada tahun 2024 ini, KPPN Pematang Siantar diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi penilaian ZI Menuju WBBM. Setelah lolos pada seleksi administrasi di tingkat Eselon I (Direktorat Jenderal Perbendaharaan), KPPN Pematang Siantar terus menyiapkan diri untuk mengikuti serangkaian penilaian baik dari internal Kementerian Keuangan (Tim Penilai Kementerian) maupun Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN-RB).

Melalui berbagai rangkaian penilaian yang dilaksanakan dari awal tahun 2024 sampai dengan tahapan wawancara virtual dan field evaluation di bulan Oktober dan November 2024, KPPN Pematang Siantar dinyatakan berhak untuk menyandang unit kerja dengan predikat ZI Menuju WBBM oleh Kementerian PAN-RB pada tahun 2024 ini. Secara resmi, penganugerahan ZI Menuju WBBM tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PAN-RB kepada Kepala KPPN Pematang Siantar pada acara “Satu Dekade Zona Integritas dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2024” yang diselenggarakan pada tanggal 11 Desember 2024 di Jakarta.

Predikat ZI Menuju WBBM ini merupakan suatu penghargaan dan kebanggaan bagi KPPN Pematang Siantar. Memiliki predikat ini menjadikan KPPN Pematang Siantar semakin mantap untuk terus meningkatkan layanan dengan melakukan perbaikan secara kontinu dan dengan tetap mengedepankan integritas dari sumber daya manusia KPPN Pematang Siantar.

KPPN Pematang Siantar, ZI WBBM, CETAR!



Pemanfaatan AI (Artificial Intelligence) dalam Pengelolaan Keuangan Negara Yang Lebih Optimal

Oleh: Zulfan



Sobat Perbendaharaan pasti sudah tahu bahwa bahwa pada saat ini manusia di seluruh penjuru dunia sedang berada di dalam sebuah era yang dikenal dengan istilah Society 5.0. Society 5.0 merupakan sebuah konsep berasal dari Jepang dan diresmikan 2 tahun yang lalu tepatnya pada 21 Januari 2019 dan merupakan resolusi atas Revolusi Industri 4.0 yang menggambarkan tahap evolusi masyarakat berdasarkan perkembangan teknologi yang melibatkan digitalisasi, otomatisasi, dan konektivitas dalam industri.

Industri 4.0 dan Society 5.0 merupakan evolusi dari pembuatan yang berfokus pada peningkatan efisiensi dan fleksibilitas produksi dimana terdapat beberapa perbedaan yang cukup signifikan antara kedua konsep tersebut. Industri 4.0 difokuskan pada peningkatan efisiensi produksi dengan mengintegrasikan teknologi seperti IoT, robotika, dan analitik data. Sedangkan Society 5.0 mengutamakan kolaborasi antara manusia dan mesin, serta memperhatikan aspek-aspek seperti lingkungan dan kesejahteraan kerja. Konsep ini memungkinkan kita menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern (AI, Robot, IoT) untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia dalam rangka menyederhanakan dan memudahkan kegiatan dan keperluan di seluruh aspek kehidupan.

Adanya pembentukan komunitas tersebut merupakan bagian dari upaya Kementerian Keuangan untuk terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan memperkuat tata kelola keuangan negara. AI dapat menjadi solusi efektif untuk menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan negara, mulai dari pengawasan hingga perencanaan yang lebih akurat dan terukur. Selain itu, pembentukan komunitas tersebut menunjukkan adanya komitmen dari Kementerian Keuangan untuk terus mendorong penggunaan AI sebagai bagian dari reformasi digital yang berkelanjutan.

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam penggunaan AI di pengelolaan keuangan negara yaitu:

1. AI dapat mendukung efisiensi dan akurasi pengelolaan keuangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penggunaan AI dapat mendeteksi anomali dalam laporan keuangan dan melakukan analisis data keuangan untuk menghitung korelasi antara jumlah alokasi anggaran dengan outcome yang dicapai,
2. AI dinilai mampu memberikan rekomendasi bentuk intervensi yang perlu dilakukan pemerintah guna merespons berbagai permasalahan keuangan. Selain itu, pemanfaatan AI diharapkan mampu mendorong perencanaan strategis yang efektif dalam mengoptimalkan pendapatan negara dan efisiensi belanja.
3. Dari penggunaan AI dalam menghitung korelasi antara alokasi anggaran dengan hasil yang dicapai, AI dapat memberikan rekomendasi langkah-langkah intervensi yang perlu dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai masalah keuangan.
4. Pemanfaatan AI juga dapat mendukung perencanaan strategis yang lebih efektif dalam meningkatkan pendapatan negara sekaligus menekan pemborosan anggaran. Hal ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya reformasi digital yang berkelanjutan di Kementerian Keuangan.



Pada akhirnya, Kementerian Keuangan telah mengambil langkah konkret untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi guna menghadapi tantangan pengelolaan keuangan yang semakin kompleks. AI dianggap mampu meningkatkan akurasi dalam pengawasan hingga menghasilkan perencanaan yang terukur dan strategis.

Komitmen Kementerian Keuangan terhadap inovasi teknologi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemanfaatan AI diharapkan dapat membawa tata kelola keuangan negara ke level yang lebih modern dan efisien.

Langkah ini juga menjadi bukti nyata komitmen Kementerian Keuangan untuk terus berinovasi dalam mengelola keuangan negara demi mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dan sekaligus menjadi bukti bahwa Kementerian Keuangan terus berupaya memanfaatkan teknologi untuk mempercepat kemajuan di bidang keuangan demi kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kedepannya CoP AI Kementerian Keuangan diharapkan mampu berkolaborasi dalam menghasilkan langkah-langkah dan inisiatif-inisiatif visioner seputar pemanfaatan AI dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Mengenal lebih dekat Museum Simalungun: Jendela Sejarah dan Budaya Suku Simalungun

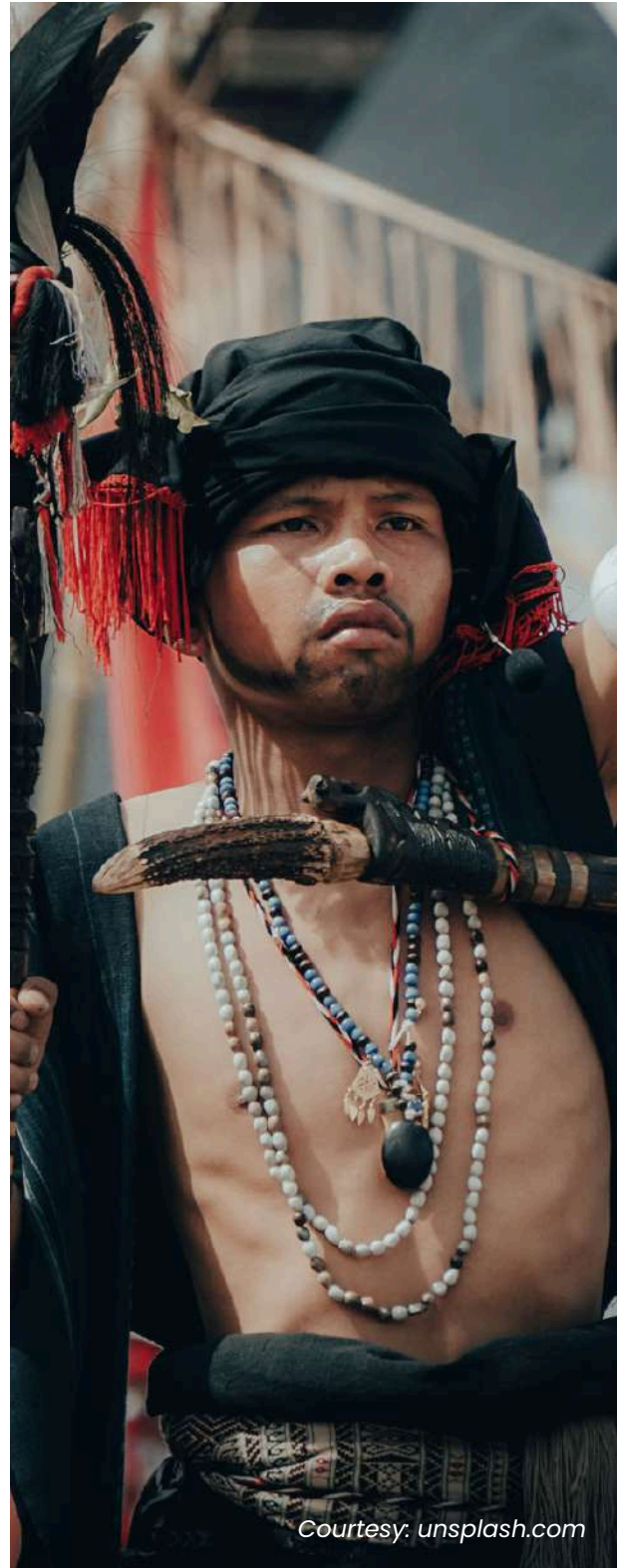
Oleh: Anggiat Tambunan

Halo Sobat Intress!

Di edisi Inang Cetar kali ini, kita akan membahas tentang Museum Simalungun yang terletak di Kota Pematang Siantar.

Museum Simalungun adalah sebuah museum daerah yang terletak di Kota Pematang Siantar, berada di Jalan Sudirman, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat. Museum ini berbentuk rumah adat Simalungun yaitu Rumah Bolon.

Dilansir dari berbagai sumber, museum ini pertama kali di bangun pada tanggal 10 April 1939 oleh Raja-Raja Simalungun. Museum Simalungun berdiri sebagai keputusan dari Raja-Raja Simalungun, kepala distrik, tungkat, tokoh masyarakat dan pemerintah dalam sebuah pertemuan 'harunguan' yang diadakan pada 14 Januari 1937. Museum ini mengalami pemugaran sebanyak dua kali. Pemugaran pertama di tahun 1968 pada masa pemerintahan Bupati Radjamin Purba, museum direnovasi dengan tetap mempertahankan keadaan aslinya yang terbuat dari kayu sehingga kondisi museum ini masih terlihat rusak dan tidak terawat. Lalu pemugaran yang kedua dilakukan pada tahun 1982, masa pemerintahan bupati Letkol (purn) JP Silitonga.



Courtesy: unsplash.com

Museum ini awalnya dikenal sebagai Rumah Pusaka Simalungun yang mencerminkan nilai tradisi yang diwariskan turun-temurun. Museum ini diresmikan dengan upacara adat dan sejak saat itu berfungsi sebagai pusat pelestarian budaya dan identitas Simalungun.

Sampai dengan saat ini, Museum Simalungun menyimpan lebih dari 800 koleksi yang diantaranya merupakan benda-benda bersejarah menyangkut adat dan budaya simalungun. Berikut beberapa jenis benda-benda koleksi Museum Simalungun:

1. Koleksi Etnografika yaitu Peralatan Rumah Tangga; Peralatan Pertanian; Peralatan Menangkap Ikan; Peralatan Meramu dan Berburu; Peralatan Pandai Emas dan Pandai Besi; Peralatan Musik dan Tari; serta Peralatan Pengrajin Tenun.
2. Koleksi Keramikologie terdiri dari berbagai jenis porselin buatan Cina, Belanda dan Spanyol.
3. Koleksi Numismatika terdiri dari berbagai mata uang seperti mata Uang Indonesia, Belanda, Jepang dan lain-lain.
4. Koleksi Naskah Kuno (Old Manuscript) yang terbuat dari kulit kayu Alim dan bambu ayan. Naskah kuno menyimpan berbagai aspek ilmu pengetahuan seperti astrologi dan astronomi serta ramuan obat tradisional.
5. Koleksi Arkeologi yang terdiri dari aneka arca yang terbuat dari batu, perunggu dan kuningan.
6. Koleksi Kerajinan tangan yakni koleksi karya seni berupa arca dan ornamen yang bahannya terbuat dari kayu dan bambu.

Museum Simalungun beroperasi setiap hari Senin – Sabtu mulai pukul 08.00–17.00 WIB sementara untuk hari Minggu museum ini libur. Dengan membayar tiket masuk sebesar Rp 5.000,- saja, setiap pengunjung sudah dapat menikmati koleksi museum yang ada di sana. Jadi, jika ada sobat Ingress yang sedang berlibur ke Kota Pematang Siantar, Museum Simalungun bisa jadi pilihan terbaik untuk mengetahui sejarah Suku Simalungun.

TIMELINE OKTOBER



01



Upacara Kesaktian Pancasila



03



FGD Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024, Diseminasi Spending Review Efektivitas Tahun 2023 dan Sosialisasi Antikorupsi Kanwil DJPb





Wawancara WBBM





FGD Monitoring Penyaluran TKD dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik Tahun 2024



Baksos HORI Tahun 2024



24



Internalisasi Strategi Organisasi



Press Release APBN Triwulan III





Bazaar UMKM



Kunjungan Kinerja Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara





Upacara Peringatan HORI di Kanwil DJP Sumut II



TIMELINE NOVEMBER



10 PACARA ARI PAHLAV



Upacara Hari Pahlawan Bersama KPKNL Pematang Siantar



Asistensi Aplikasi Sakti dan Sosialisasi Pembinaan Pejabat Fungsional APK dan PK APBN





Pencanangan Zona Integritas oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Simalungun



Sosialisasi Antikorupsi berkolaborasi dengan Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara



19

KEMENTERIAN KE
REPUBLIK INDONESIA



**Monev Pelaksanaan Anggaran,
Digitalisasi Pembayaran, Pembinaan
Pejabat Perbendaharaan dan
Pengendalian Retur SP2D Bulan
November Tahun 2024 ke Kantor
Imigrasi Kelas II TPI Pematang Siantar**

Selasa, 19 November 2024



KPPN Pematang Siantar

KPPN Pematang Siantar

KPPN Pematang Siantar

20

KEMENTERIAN KE
REPUBLIK INDONESIA

KPPN
PEMATANG SIANTAR



**Monev Pelaksanaan Anggaran,
Digitalisasi Pembayaran, Pembinaan
Pejabat Perbendaharaan dan
Pengendalian Retur SP2D Bulan
November Tahun 2024 ke Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Simalungun**

Rabu, 20 November 2024



KPPN Pematang Siantar

KPPN Pematang Siantar

KPPN Pematang Siantar

<https://dppb.kemkeu.go.id/kppn/pematangsiantar/>

20



Kegiatan Press Release APBN dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Satker serta Sosialisasi Zero Retur SP2D Periode s.d. Oktober 2024

Rabu, 20 November 2024

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Handal

KPPN Pematang Siantar

21



Monev Pelaksanaan Anggaran, Digitalisasi Pembayaran, Pembinaan Pejabat Perbendaharaan dan Pengendalian Retur SP2D Bulan November Tahun 2024 ke Badan Narkotika Nasional Kab. Simalungun

Kamis, 21 November 2024



21

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

InPress
INDONESIAN TRAINING

"Penuh Warna: Perjalanan
Karya penuh Prestasi"
KPPN
PEMATANG SIANTAR

Talkshow Inspiratif

Penuh Warna: Perjalanan Karya penuh

Talkshow Inspiratif Pengarusutamaan

Nama : Qur'ata Ayun

Gender "Penuh Warna: Perjalanan Karya penuh Prestasi"

Pengalaman Organisasi

Kamis, 21 November 2024

1. Project Manager Women Islamic Studies Hub Kemendikbud

2. Project Manager Women Islamic Studies Hub Kemendikbud



FGD Refreshment Cash Management dan
Pelatihan Service Excellence Triwulan IV Tahun 2024



28



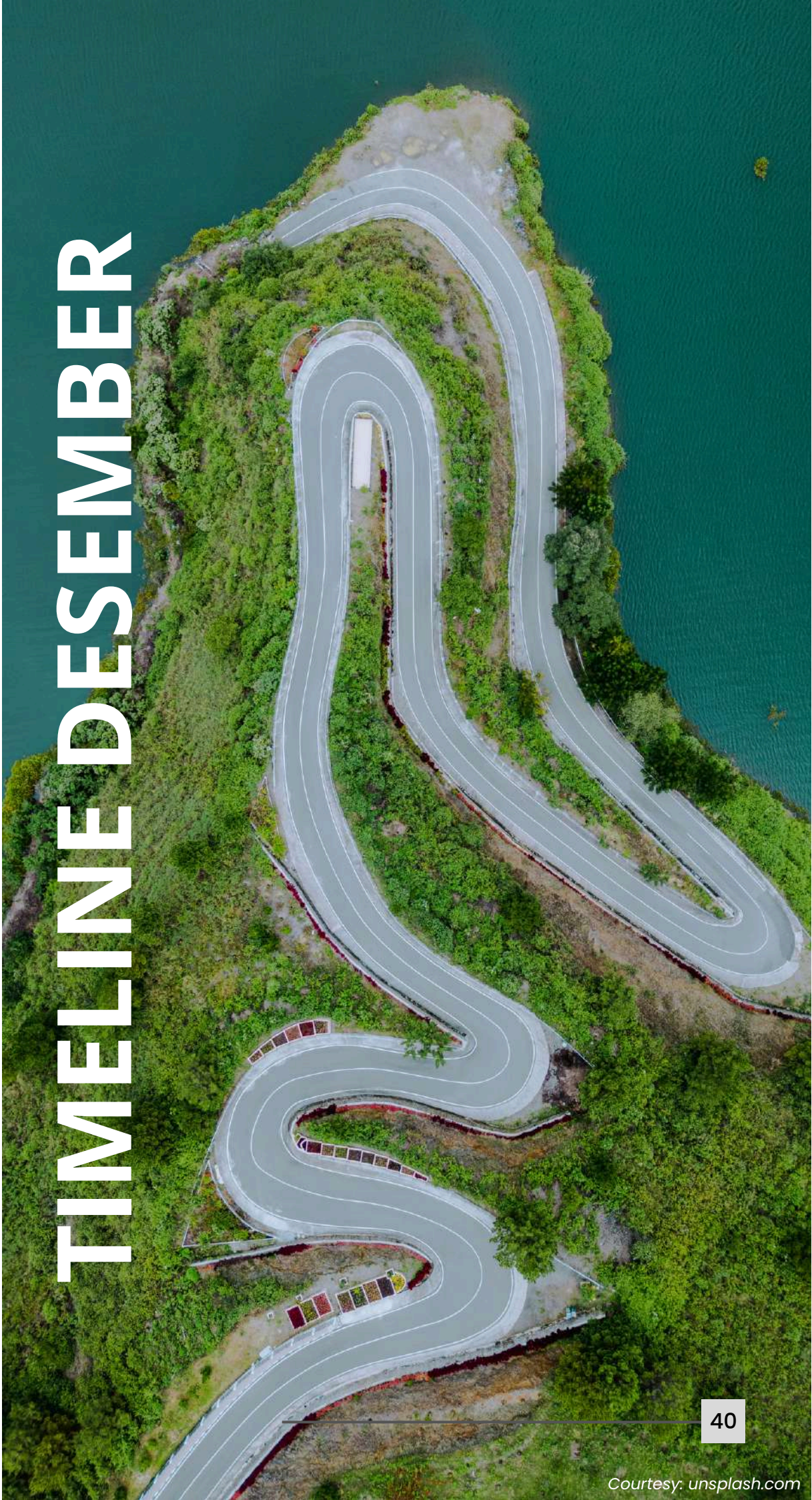
FGD Data Analytic dengan topik "Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dan Analisis PDRB Kota Pematangsiantar" bersama BPS Kota Pematangsiantar



Senam Kemenkeu Satu HAKORDIA 2024



TIMELINE DESEMBER





1. Peringkat ke II Kategori KPPN Tipe A1 Laporan Keuangan Tingkat BUN KPPN Tahun 2023
2. Peringkat ke III Implementasi DIGIPAY KPPN Tipe A1 sampai dengan Triwulan III 2024
3. Peringkat I Pelaksanaan Tuhas Kepatuhan Internal pada KPPN Tipe A1
4. Peringkat I Hasil Pembinaan, Supervisi, dan Penilaian Kieja KPPN pada KPPN Tipe A1



Pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat.

Implementasi konsep BLU merupakan amanat **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004** tentang Perbendaharaan Negara. Lebih lanjut terkait pengelolaan keuangan BLU dan fleksibilitasnya diatur dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005** (e. 74 Tahun 2012) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Instansi Pemerintah
Berkecukupan sebagai instansi pemerintah. Sebagai merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan.

Pengelolaan Otomatis
Diadopsi secara otomatis dengan prinsip efisiensi dan produktivitas yang maksimal.

Tujuan Berkegiatan
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka melakukan kewajibannya umum dan memberikan pelayanan yang terbaik.

Menghasilkan Barang/Jasa
Menghasilkan barang/jasa yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Layanan Masyarakat
Membantu pelayanan kepada masyarakat.

Tidak Menuntut Keuntungan
Tidak menggunakan manfaat keuntungan dalam melakukan kegiatannya.

Manfaat BLU pada Layanan Publik

- Akselerasi peningkatan kualitas layanan publik.** Masyarakat dapat mengakses layanan dengan cepat dan mudah, namun dengan biaya/harga yang terjangkau.
- Penyediaan layanan publik secara efektif dan efisien.** BLU sebagai instansi pemerintah yang berkinerja secara advance dari sisi produktivitas.





Rabu & Kamis, 11 - 12 Desember 2024



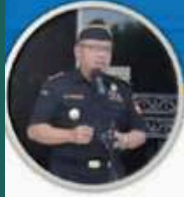
18

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



KPPN
PEMATANG SIANTAR

DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI



BEA DAN CUKAI PEMATANGSIANTAR



SE DAN EVALUASI
IN ANG
ER 2024

Press Release APBN dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Satker K/L Periode s.d. November 2024, Asistensi Aplikasi SAKTI dan Digitalisasi Pembayaran serta Sosialisasi Zero Retur SP2D Periode Desember 2024

Rabu, 18 Desember 2024

EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN
s.d. November 2024

19

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



KPPN
PEMATANG SIANTAR



Asistensi Laporan Keuangan dan Aplikasi SAKTI Periode Desember 2024 serta Sosialisasi RPATA dalam Rangka Langkah Langkah Akhir Tahun Anggaran 2024

Kamis, 19 Desember 2024



19



Penandatanganan Memorandum of Understanding Kerja Sama dalam Rangka Upaya Percepatan Implementasi Marketplace dan Digital Payment pada Satuan Kerja

Kamis, 19 Desember 2024



20



Ibadah Bintang Kristiani Periode Desember 2024

Jumat, 20 Desember 2024



TIM



Courtesy: unsplash.com

Buletin

Penanggungjawab

Nova Juliana Sianturi

Pemimpin Redaksi

Roland Fernando

Sekretaris Media

Angelica Ester J Tampubolon

Koordinator Penyusunan BAB

Roland Fernando

Zulfan

Tommy Hansen Panjaitan

Yusuf Prihantoro

Surya Hadi



Meet The Team



Zulfan
Kontributor



Roby
Editor



Imelda
Penata Letak dan Grafis



Tommy
Kontributor



Armansyah
Editor



Nelly
Penata Letak dan Grafis



Surya
Kontributor



Norman
Editor



Louise
Penata Letak dan Grafis



Yusuf
Kontributor



Prima
Editor



Ranissa
Penata Letak dan Grafis



Anggiat
Kontributor



Nurhawati
Copywriter



Chiltry
Kontributor



Fadly
Copywriter



Trisfila
Kontributor



Uli
Copywriter



Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1
Pematangsiantar

Jl. Rajamin Purba No.119, Bukit Sofa, Kec. Siantar Sitalasari, Kota
Pematang Siantar, Sumatera Utara 21142